



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat anugerah-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini, merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga telah diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan ini digunakan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang memberikan gambaran program dan kegiatan yang dikerjakan tahun 2024, dengan harapan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

Palu, 26 Juli 2023

**Plh. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**SALIM, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.19721230 200012 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi .....	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sd. Triwulan II tahun 2023 .....	12
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd. Triwulan II Tahun 2023.....	16
Tabel T-C.30	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sd. Triwulan II tahun 2023 .....	23
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah .....	27
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah .....	33
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah .....	37
Tabel 4	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	43

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 - 2026 yang berisikan informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen Perencanaan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan, dari tahapan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah;
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategis RPJMD serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya;
3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja Instansi.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat daerah, keterkaitan antara Renja



Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan;



4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Table yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing – masing.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format Tabel T-C.30.

## 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Menampilkan Tabel T-C.31.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
  1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
  2. Pencapaian SDGs;
  3. Pengentasan kemiskinan;
  4. Pencapaian NSPK dan SPM;
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi Daerah;
  6. Pengembangan Daerah terisolir; dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  1. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Table rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat program, kegiatan beserta indikator output dan outcome serta pendanaannya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 yang telah dilaksanakan memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 mendatang,

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, pelaksanaannya berdasarkan realisasi yakni :

➤ Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 :

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.233.154.401,- realisasi anggaran adalah Rp. 24.625.650.361,- atau 97,59%. Dengan uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Target Anggaran Rp. 21.126.530.876,- realisasi Rp. 20.804.546.024,- atau 98,48 %, realisasi kinerjanya berupa capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Nilai 71,74), capaian Persentase Realisasi Anggaran (98,53%), capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (77,75) dengan rincian :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 81.113.450,- realisasi Rp. 79.953.450,- (98,57%) dengan capaian kinerja 100% (8 Dokumen : Renja, RKA, DPA, MR, RKA Perubahan, DPPA, Lakip Tahun 2021, Laporan Ikhtisar hasil Pengawasan Tahun 2021);

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target anggaran Rp. 15.737.085.164,- realisasi Rp. 15.505.720.560,- (98,53%) capaian kinerja 100% (2 Dokumen yakni Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, dan Laporan Keuangan Tahun 2021);
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah target anggaran Rp. 88.010.000,- realisasi Rp. 87.410.000,- (99,32%), capaian kinerjanya 100% (2 Laporan yakni Rekonsiliasi BMD semester 1 dan 2);
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target anggaran Rp. 694.812.875,- realisasi Rp. 667.542.088,- (96,08%), dengan capaian kinerjanya 100% (1 Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM));
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah target anggaran Rp. 901.734.096,- realisasi Rp. 892.970.694,- (99,03%) dengan persentase capaian kinerja 100% (4 Laporan penyediaan barang dan jasa);
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target anggaran Rp. 2.074.470.650,- realisasi Rp. 2.064.978.981,- (99,54%) dengan persentase capaian kinerja 100% (1 laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yakni 189 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya);
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target anggaran Rp. 1.307.864.641,- realisasi Rp. 1.271.775.251,- (97,24%) dengan persentase capaian kinerja 100% (2 Laporan);
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target anggaran Rp. 241.440.000,- realisasi Rp. 240.195.000,- (99,48%) dengan persentase capaian kinerja 100% (3 Laporan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Lainnya, Gedung Kantor).

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Dengan anggaran sebesar Rp. 3.408.565.675,- realisasi anggaran Rp. 3.160.674.925,- atau 92,73%, realisasi kinerjanya 66% untuk Persentase Capaian Penyelesaian TLHP BPK, 94% untuk Persentase Capaian Penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri, 75% untuk Persentase Capaian Penyelesaian TLHP Inspektorat, dan 84,62% untuk Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, dengan rincian :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal target anggaran Rp. 3.319.068.425,- realisasi Rp. 3.107.777.675,- (93,63%) dengan persentase capaian kinerja 103% dari target 641 Laporan, realisasi 663 Laporan (24 Laporan Pengawasan Kinerja, 74 Laporan Pengawasan Keuangan, 183 Reviu Laporan Kinerja, 328 Reviu Laporan Keuangan, 1 Kesepakatan Pengawasan Internal, 53 Dokumen Monev TLHP BPK RI dan APIP);
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu target anggaran Rp. 89.497.250,- realisasi Rp. 52.897.250,- (59,10%) dengan persentase capaian kinerja 100% (7 laporan pengawasan Riksus/Investigasi).

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Dengan anggaran sebesar Rp. 698.057.850,- realisasi anggaran Rp. 660.429.412,- atau 94,61%, realisasi kinerjanya 100% (Capaian Level 3 Kapabilitas APIP) dengan rincian :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan target anggaran Rp. 144.726.900,- realisasi Rp. 121.576.900,- (84%) dengan persentase capaian kinerja 100% (1 Laporan: Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan);
- 2) Pendampingan dan Asistensi target anggaran Rp. 553.330.950,- realisasi Rp. 538.852.512,- (97,38%) dengan capaian kineja 100% (110 Laporan : 2 Laporan LHKPN/LHKASN, 48 Laporan PM Reformasi Birokrasi, 48 Laporan SPIP, 11 laporan Keg. Monev Pencegahan Pemberantasan Korupsi, 1 laporan Pendampingan Penegakan Integritas).

- Evaluasi pelaksanaan renja sd. Triwulan II Tahun 2023 :



**TABEL 2.1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH SD. TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4		5		6	
	6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	6	01				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						
1	6	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Nilai</b>	<b>74</b>	<b>21.102.671.294</b>	-	<b>9.690.903.582</b>
						<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>85</b>	-			
						<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>45,93</b>			
	6	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>129.860.850</b>	<b>1</b>	<b>2.844.850</b>
	6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	127.016.000	-	0
	6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Laporan	2	2.844.850	1	2.844.850
	6	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>17.378.230.578</b>	<b>1,50</b>	<b>7.610.202.175</b>
	6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Org/Bln	110	17.224.350.578	110	7.528.262.175
	6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Laporan	1	153.880.000	1	81.940.000
	6	01	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>84.610.000</b>	<b>0,50</b>	<b>28.080.000</b>
	6	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	84.610.000	0,50	28.080.000
	6	01	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>700.381.850</b>	<b>0,50</b>	<b>461.266.794</b>
	6	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.200.000	0,50	57.975.000

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4		5		6	
	6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	538.844.350	16	350.317.944
	6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	740	61.337.500	670	52.973.850
	<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>4</b>	<b>616.294.950</b>	<b>2,50</b>	<b>377.451.400</b>
	6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.810.550	1	5.786.900
	6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	39.324.400	0,50	20.152.650
	6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	245.000.000	0,50	122.500.000
	6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	326.160.000	0,50	229.011.850
	<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>480.369.016</b>	<b>1</b>	<b>476.464.000</b>
	6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	104	480.369.016	104	476.464.000
	<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>1.530.684.050</b>	<b>1</b>	<b>673.157.180</b>
	6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	343.020.900	0,50	163.673.830
	6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1.187.663.150	0,50	509.483.350

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023		
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4		5		6		
	6	01	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>182.240.000</b>	<b>1,25</b>	<b>61.437.183</b>
	6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	120.450.000	13	40.009.683
	6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	63	51.790.000	32	12.177.500
	6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Unit	2	10.000.000	2	9.250.000
2	6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>	%	<b>77</b>	<b>5.201.076.000</b>	<b>59,38</b>	<b>2.483.902.000</b>
						<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri</b>	%	<b>88</b>	<b>61,70</b>			
						<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat</b>	%	<b>80</b>	<b>13,94</b>			
						<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan</b>	%	<b>64,10</b>	<b>53,85</b>			
	6	01	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Laporan</b>	<b>605</b>	<b>4.883.326.000</b>	<b>496</b>	<b>2.437.252.000</b>
	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	214	2.062.800.000	113	1.083.562.000
	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	309	1.473.110.000	364	1.020.640.000
	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	40.950.000	2	7.200.000
	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Laporan	68	209.700.000	15	20.700.000
	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan	1	245.346.000	1	89.580.000
	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP	Dokumen	9	851.420.000	1	215.570.000

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sd. Triwulan II Tahun 2023	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4		5		6	
	6	01	02	1.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Laporan</b>	<b>16</b>	<b>317.750.000</b>	<b>7</b>	<b>46.650.000</b>
	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Laporan	2	40.000.000	-	-
	6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	14	277.750.000	7	46.650.000
3	6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</b>	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>495.600.000</b>	<b>-</b>	<b>134.010.000</b>
	6	01	03	1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>6.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	1	6.500.000	-	-
	6	01	03	1.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Laporan</b>	<b>51</b>	<b>489.100.000</b>	<b>3</b>	<b>134.010.000</b>
	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	49	169.950.000	48	51.900.000
	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	259.150.000	1	82.110.000
	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	60.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>								<b>%</b>	<b>100</b>	<b>26.799.347.294</b>	<b>45,93</b>	<b>12.308.815.582</b>

Berikut ini Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2023**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11= (10/4)
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Persentase Capaian Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</i>	- -	<b>100%</b>	-	-		-	-	-
		Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai 74		70	71,74	102,49	74	-	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 85		80	77,75	97,19	85	-	0
		Persentase Realisasi Anggaran	% 98		98	98,53	100,54	98	45,93	46,87
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen 3	<b>8 Dokumen</b>	8	8	100	3	1	33,33
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen 1	4 Dokumen	6	6	100	1	-	0
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan 2	4 Dokumen	2	2	100	2	1	50
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>	- -	<b>14 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen 2		2	2	100	2	1,50	75

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11= (10/4)
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln 110	12 Laporan	115	115	100	110	110	100
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan 1	2 laporan	1	1	100	1	1	100
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan 1</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>50</b>
6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan 1	2 Laporan	2	2	100	1	0,50	50
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	-	4 Laporan	-	-	-	-	-	-
		<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	Dokumen 1		1	1	100	1	-	0
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen 1	1 Laporan	1	1	100	1	0,50	50
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang 26	2 Laporan	48	48	100	26	16	61,54
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang 740	1 Laporan	595	595	100	740	670	90,54
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan 4</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>2,50</b>	<b>62,50</b>
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket 1	1 Paket	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11= (10/4)
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket 1	1 Paket	1	1	100	1	0,50	50
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket 1	1 Paket	1	1	100	1	0,50	50
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan 1	1 Laporan	1	1	100	1	0,50	50
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan 1</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit 104	1 Paket	189	189	100	104	104	100
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan 2</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan 1	12 Bulan	12	12	100	1	0,50	50
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan 1	1 Paket	1	1	100	1	0,50	50
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan 3</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>1,25</b>	<b>41,67</b>
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit 13	1 Paket	13	13	100	13	13	100
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit 63	1 Paket	74	74	100	63	32	50,79
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit 2	3 Paket	1	1	100	2	2	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11= (10/4)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	% 77	-	75	66	88	77	59,38	77,12
		Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	% 88	-	86	94	109,30	88	61,70	70,11
		Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	% 80	-	77	75	97,40	80	13,94	17,43
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	% 64,10	-	51,28	84,62	165,02	64,10	53,85	84,01
		<i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan</i>	- -	80,39 %	-	-	-	-	-	-
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan 605	365 Laporan	641	663	103,43	605	496	81,98
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan 214	48 Laporan	24	24	100	214	113	52,80
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan 309	48 Laporan	74	74	100	309	364	117,80
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan 4	114 Laporan	183	183	100	4	2	50
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan 68	11 Laporan	328	328	100	68	15	22,06
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan 1	-	1	1	100	1	1	100
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen 9	144 Laporan	31	53	170,97	9	1	11,11

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11= (10/4)
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Laporan 16	291 Laporan	7	7	100	16	7	43,75
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan 2	48 laporan	0	0	0	2	-	0
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan 14	243 LHP	7	7	100	14	7	50
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</b>	Level 3	-	3	3	100	3	-	0
		<i>Persentase Capaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	-	85 %	-	-	-	-	-	-
<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Laporan 1	1 Laporan	1	1	100	1	-	0
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi 1	1 Laporan	1	1	100	1	-	0
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	Laporan 51	216 Laporan	110	110	100	51	3	5,88
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah 48	196 laporan	48	48	100	48	48	100
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kegiatan 2	15 Laporan	11	11	100	2	1	50
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah 1	5 Laporan	2	2	100	1	-	-

Reviu hasil pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2022), dan kaitannya dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun berjalan (sampai dengan triwulan II tahun 2023), yakni bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatannya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, bahkan diantaranya telah melebihi target. Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi kinerja dua diantaranya melebihi dari target yang direncanakan, namun pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hanya mencapai 97,19%, untuk program Penyelenggaraan Pengawasan dari realisasi keempat indikator kinerjanya, hanya Tindak Lanjut Itjen Kemendagri dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang melebihi target, sedangkan pada Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat dibawah 100%, dan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi realisasi kinerjanya tercapai 100% dari target yang direncanakan, yakni memperoleh Level 3 pada Capaian Kapabilitas APIP.

Dari ketiga program tersebut diatas terdapat beberapa hal yang menjadi kendala tidak tercapainya target indikator kinerja programnya yakni :

1. Pada pelaksanaan pencapaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, tidak semua kuisioner terisi oleh responden, sehingga indeks yang ditetapkan tidak dapat tercapai;
2. Pada capaian persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, memiliki kendala bahwa kurangnya respon yang baik dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelesaian rekomendasi temuan.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan faktor waktu pelaksanaan;

Sehingga implikasi yang ditimbulkan dari hal tersebut, mempengaruhi capaian beberapa kinerja menjadi kurang maksimal. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam hal perencanaan dan penganggaran yakni dengan mengalokasikan kembali ditahun berikutnya untuk kegiatan – kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan ditahun sebelumnya, serta memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peran dan tanggung jawab

strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat.

➤ **Tugas**

Inspektorat Daerah Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

➤ **Fungsi**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri.
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berikut ini kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2023, yang ditampilkan melalui Tabel T-C. 30.

**TABEL T-C. 30**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SD. TRIWULAN II TAHUN 2023**

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022 (n-2)	TAHUN 2023 (n-1)	TAHUN 2024 (n)	TAHUN 2025 (n+1)	TAHUN 2022 (n-2)	TAHUN 2023 (n-1)	TAHUN 2024 (n)	TAHUN 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks 62	Indeks 64	Indeks 66	Indeks 68	Indeks 66,77	-	-	-	Fokus item Penilaian terdiri dari Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A			10,42% (5 PD)	33,33% (16 PD)	41,67% (20 PD)	62,50% (30 PD)	18,75% (9 PD)	36,73% (18 PD)		-	Realisasi = PD dg nilai SAKIP A/Jum.PD x 100%
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Level 3 (Nilai 3,20)	Level 3 (Nilai 3,40)	Level 3 (Nilai 3,50)	Level 3 (Nilai 3,60)	Level 3 (Nilai 3,20)	-	-	-	Fokus Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari Maturitas Penyelenggaraan SPIP (bagian dari Level Kapabilitas APIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Adapun tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatannya dalam mencakup ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota serta Kementrian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang juga merupakan Misi ke 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMD periode tahun 2021-2026, yang dalam hal ini mendukung sasaran startegis Kementrian, yakni “Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini sebagai indikator kinerja utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Dalam Negeri”.

Terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independent;
3. Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
4. Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan peneanaan sanksi (Reward and Punishment);

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, yakni :

➤ Peluang :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat;

2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
  3. Efektivitas dampak hasil pemeriksaan;
  4. Adanya penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas;
  5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan.
- Tantangan :
1. Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional, melalui hasil penguatan Pengawasan Fungsional oleh internal dan eksternal instansi, belum dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata Kelola dan kualitas kebijakan secara berkelanjutan, sehingga melalui sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN);
  2. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah;
  3. Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraph penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  4. Jumlah rekomendasi temuan/pelanggaran masih relative tinggi, baik temuan BPK, Itjen Kemendagri maupun Inspektorat;
  5. Tingkat capaian penyelesaian rekomendasi temuan oleh Perangkat Daerah/ Obyek Pemeriksaan masih rendah;
  6. Mempertahankan konsistensi pencapaian pelaksanaan Kapabilitas APIP dan penyelenggaraan SPIP level 3, menuju level berikutnya;
  7. Penyelesaian terhadap kasus pengaduan.

Dari permasalahan, tantangan dan peluang di atas, itulah yang menjadi isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti hal tersebut yang



akan dituangkan dalam perumusan program, kegiatan prioritas untuk tahun yang direncanakan dengan mengoptimalkan dukungan anggaran terhadap program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam hal mendukung kualitas peningkatan SDM APIP, maupun sarana dan prasarana yang mendukung kinerja;
2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu, dalam rangka penguatan pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dalam hal mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Saber Pungli, dan kegiatan Penegakan Integritas.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dalam rangka mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan maka dilakukan penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah melalui analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.

**TABEL T-C. 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Persentase Realisasi Anggaran Indeks KePuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 80  % 98  Indeks 88,50	18.097.394.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Persentase Realisasi Anggaran Indeks KePuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 80  % 98  Indeks 88,50	27.593.624.400,25	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dok 10</b>	<b>165.454.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dok 3</b>	<b>129.860.850</b>	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. 6	150.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok 1	127.016.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap 4	15.454.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap 2	2.844.850	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>	<b>Dok 2</b>	<b>15.110.050.205</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>	<b>Dok 2</b>	<b>18.456.974.400,25</b>	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/ Bln 115	15.094.585.205	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/ Bln 110	18.287.494.400,25	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap 2	15.465.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap 1	169.480.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Lap 2</b>	<b>52.547.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Lap 1</b>	<b>84.610.000</b>	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lap 2	52.547.000	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lap 1	84.610.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>Dok 1</b>	<b>483.878.750</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>Doc 1</b>	<b>1.280.358.850</b>	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doc 2	70.265.000	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doc 1	100.200.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kab dan luar daerah lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org 22	257.105.000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kab dan luar daerah lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org 26	1.118.821.350	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org 850	156.508.750	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org 740	61.337.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	Lap 4	<b>396.303.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	Lap 4	<b>1.022.452.050</b>	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt 1	8.303.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt 1	11.848.800	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt 1	13.000.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt 1	44.451.250	
	- Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt 1	225.000.000	- Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt 1	312.500.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap 1	150.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap 1	653.652.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Lap 1	<b>150.415.350</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Lap 1	<b>4.912.478.200</b>	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit 1	<b>150.415.350</b>	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit 104	4.912.478.200	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Lap 2	<b>1.371.025.501</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Lap 2	<b>1.531.840.050</b>	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap 12	345.924.700	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap 1	343.020.900	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap 1	1.025.100.801	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap 1	1.188.819.150	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Lap 3	367.720.194	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Lap 3	175.050.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit 1	137.300.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit 13	120.450.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit 1	100.000.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit 63	44.600.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit 3	130.420.194	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit 2	10.000.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>	% 79	1.137.274.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>	% 79	8.668.670.000	
			<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri</b>	% 90				<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri</b>	% 90		
			<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat</b>	% 85				<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat</b>	% 85		
			<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan</b>	% 76,92				<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan</b>	% 76,92		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Lap 452</b>	<b>999.224.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Lap. 605</b>	<b>8.212.770.000</b>	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Lap 48	38.000.000	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Lap. 214	4.512.010.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. 192	38.000.000	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. 309	1.568.190.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	Prov. Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Lap. 170	580.000.000	- Reviu Laporan Kinerja	Prov.Kab /Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Lap. 4	40.950.000	
	- Reviu Laporan Keuangan	Prov.Kab /Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Lap. 8	45.224.000	- Reviu Laporan Keuangan	Prov.Kab /Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Lap. 68	209.700.000	
	-	-	-	-	-	- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Lap.	800.000.000	
	- Kerjasama Pengawasan Internal	-	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepa 1 katan	48.000.000	- Kerjasama Pengawasan Internal	Provinsi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kese 1 Pakaan	122.500.000	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prov. Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Dok 33	250.000.000	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prov.Kab /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Dok 9	959.420.000	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Lap 18</b>	<b>138.050.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Lap. 16</b>	<b>455.900.000</b>	
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	Lap. 8	33.750.000	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	Lap 2	90.000.000	
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap 10	104.300.000	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap. 14	365.900.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)</b>	<b>Level 3</b>	<b>323.472.000</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)</b>	<b>Level 3</b>	<b>1.025.200.000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>		<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Lap 1</b>	<b>18.175.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>		<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Lap 1</b>	<b>6.500.000</b>	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Reko men dasi 1	18.175.000	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Reko men dasi 1	6.500.000	
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Lap 65</b>	<b>305.297.000</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Lap 51</b>	<b>1.018.700.000</b>	
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD 48	100.000.000	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD 49	185.550.000	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg 11	105.297.000	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg. 2	743.150.000	
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD 6	100.000.000	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD 1	90.000.000	
					<b>19.558.140.000</b>					<b>37.287.494.400,25</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Disajikan dalam bentuk Tabel T-C.32.

Untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam subbab ini tidak terdapat usulan program/kegiatan dari Pemangku kepentingan.

**TABEL T-C. 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**OPD : INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan 7 agenda Pembangunan Indonesia.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Yang mana dari semnilan Misi tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Misike 8 (delapan) yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran RENJA tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)”. Dari tujuan tersebut maka sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terbagi dalam 3 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yakni :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
  - ❖ Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ❖ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ❖ Penyediaan Bahan/Material
  - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - ❖ Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
  - ❖ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - ❖ Reviu Laporan Kinerja

- ❖ Reviu Laporan Keuangan
  - ❖ Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
  - ❖ Kerjasama Pengawasan Internal
  - ❖ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- ❖ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - ❖ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- ❖ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2) Pendampingan dan Asistensi
- ❖ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - ❖ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - ❖ Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dituangkan dalam rincian tabel T-C. 33 sebagai berikut :

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
6	1				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			<b>37.287.494.400,25</b>					<b>40.270.493.952</b>
6	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>		<b>Nilai 80</b>	<b>27.593.624.400,25</b>			<b>Nilai 83</b>	<b>29.801.114.352</b>
				<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>			<b>% 98</b>			<b>% 98</b>			
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>			<b>Indeks 88,50</b>			<b>Indeks 90</b>			
6	1	1	1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Dok 5</b>	<b>129.860.850</b>			<b>Dok 10</b>	<b>140.249.718</b>
6	1	1	1	1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Dok 1	127.016.000	PAD		Dok 6	137.177.280
6	1	1	1	6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Lap 4	2.844.850	PAD		Lap 4	3.072.438
6	1	1	1		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>		<b>Dok 2</b>	<b>18.456.974.400,25</b>			<b>Dok 2</b>	<b>19.933.532.352</b>
6	1	1	1	1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Org/ Bln 109	18.287.494.400,25	PAD		Org/Bln 109	19.750.493.952
6	1	1	1	5	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Lap 1	169.480.000	PAD		Lap 2	183.038.400

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	1		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Lap 2</b>	<b>84.610.000</b>			<b>Lap 2</b>	<b>91.378.800</b>
6	1	1	1	5	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi	Lap 2	84.610.000	PAD		Lap 2	91.378.800
6	1	1	1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>		<b>Dok 1</b>	<b>1.280.358.850</b>			<b>Dok 1</b>	<b>1.382.787.558</b>
6	1	1	1	4	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Doc 1	100.200.000	PAD		Doc 2	108.216.000
6	1	1	1	9	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi, Kab. dan Luar Kota Lainnya	Org 83	1.118.821.350	PAD		Org 24	1.208.327.058
6	1	1	1	1	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Org 740	61.337.500	PAD		Org 850	66.244.500
6	1	1	1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		<b>Lap 4</b>	<b>1.022.452.050</b>			<b>Lap 4</b>	<b>1.104.248.214</b>
6	1	1	1	2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	Paket 1	11.848.800	PAD		Paket 1	12.796.704
6	1	1	1	5	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	Paket 1	44.451.250	PAD		Paket 1	48.007.350
6	1	1	1	7	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi	Paket 1	312.500.000	PAD		Paket 1	337.500.000
6	1	1	1	9	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Lap. 1	653.652.000	PAD		Lap 1	705.944.160
6	1	1	1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Lap 1</b>	<b>4.912.478.200</b>			<b>Lap 1</b>	<b>5.305.476.456</b>
6	1	1	1	6	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Provinsi	Unit 726	4.912.478.200	PAD		Unit 1	5.305.476.456

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Lap 2</b>	<b>1.531.840.050</b>			<b>Lap 2</b>	<b>1.654.387.254</b>
6	1	1	1	2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Provinsi	Lap 1	343.020.900	PAD		Lap 12	370.462.572
6	1	1	1	4	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Provinsi	Lap 1	1.188.819.150	PAD		Lap 1	1.283.924.682
6	1	1	1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Lap 3</b>	<b>175.050.000</b>			<b>Lap 3</b>	<b>189.054.000</b>
6	1	1	1	1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Provinsi	Unit 12	120.450.000	PAD		Unit 1	130.086.000
6	1	1	1	6	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Provinsi	Unit 62	44.600.000	PAD		Unit 1	48.168.000
6	1	1	1	9	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Provinsi	Unit 1	10.000.000	PAD		Unit 3	10.800.000
6	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK</b>		<b>% 79</b>	<b>8.668.670.000</b>	-		<b>% 81</b>	<b>9.362.163.600</b>
						<b>Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri</b>		<b>% 90</b>				<b>% 92</b>	
						<b>Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat</b>		<b>% 85</b>				<b>% 90</b>	
						<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan</b>		<b>% 76,92</b>				<b>% 89,74</b>	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	2	1		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Lap. 462</b>	<b>8.212.770.000</b>			<b>Lap 462</b>	<b>8.869.791.600</b>
6	1	2	1	1	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Lap. 49	4.512.010.000	PAD		Lap. 49	4.872.970.800
6	1	2	1	2	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Lap. 192	1.568.190.000	PAD		Lap. 192	1.693.645.200
6	1	2	1	3	- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Provinsi , Kab./ Kota	Lap. 170	40.950.000	PAD		Lap. 170	44.226.000
6	1	2	1	4	- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi , Kab./ Kota	Lap. 8	209.700.000	PAD		Lap. 8	226.476.000
6	1	2	1	5	- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Provinsi , Kab./ Kota	Lap. 9	800.000.000	PAD		Lap. 9	864.000.000
6	1	2	1	6	- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Provinsi	Kesepa katan 1	122.500.000	PAD		Kesepa katan 1	132.300.000
6	1	2	1	7	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi , Kab./ Kota	Dok 33	959.420.000	PAD		Dok 33	1.036.173.600
6	1	2	2		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Lap. 18</b>	<b>455.900.000</b>			<b>Lap. 18</b>	<b>492.372.000</b>
6	1	2	2	1	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Provinsi	Lap. 8	90.000.000	PAD		Lap. 8	97.200.000
6	1	2	2	2	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Lap. 10	365.900.000	PAD		Lap. 10	395.172.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		Level 3	1.025.200.000	-		Level 3	1.107.216.000
6	1	3	1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>		Lap 1	6.500.000			Lap 1	7.020.000
6	1	3	1	1	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Provinsi	Rekomendasi 1	6.500.000	PAD		Rekomendasi 1	7.020.000
6	1	3	1		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>		Lap 66	1.018.700.000			Lap 68	1.100.196.000
6	1	3	1	2	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	PD 49	185.550.000	PAD		PD 49	200.394.000
6	1	3	1	3	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Kegiatan 11	743.150.000	PAD		Kegiatan 11	802.602.000
6	1	3	1	4	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	PD 6	90.000.000	PAD		PD 8	97.200.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2024 dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 37.287.494.400,25,-. Adapun rincian rencana kerja dan pendanaannya adalah sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						37.287.494.400,25	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			Nilai	80	27.593.624.400,25	
						Persentase Realisasi Anggaran			%	98		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	88,50		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dok	5	129.860.850	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Dok	1	127.016.000	PAD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Lap	4	2.844.850	PAD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Tersedianya Dokumen Keuangan		Dok	1	18.456.974.400,25	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Org/ Bln	109	18.287.494.400,25	PAD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Lap	1	169.480.000	PAD

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Pengelolaan barang Milik Daerah</b>		<b>Lap</b>	<b>2</b>	<b>84.610.000</b>	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Lap	2	84.610.000	PAD
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>Tersedianya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>		<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>1.280.358.850</b>	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Dok	1	100.200.000	PAD
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Lainnya	Org	83	1.118.821.350	PAD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi, Kab. dan luar daerah lainnya	Org	740	61.337.500	PAD
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		<b>Lap</b>	<b>4</b>	<b>1.022.452.050</b>	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Pkt	1	11.848.800	PAD
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Pkt	1	44.451.250	PAD
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Tersedianya Bahan/Material	Provinsi	Pkt	1	312.500.000	PAD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Kab. dan luar daerah lainnya	Lap	1	653.652.000	PAD
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Lap</b>	<b>1</b>	<b>4.912.478.200</b>	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Unit	726	4.912.478.200	PAD

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Lap</b>	<b>2</b>	<b>1.531.840.050</b>	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Lap	1	343.020.900	PAD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Lap	1	1.188.819.150	PAD
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Lap</b>	<b>3</b>	<b>175.050.000</b>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Unit	12	120.450.000	PAD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lannya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lannya	Provinsi	Unit	62	44.600.000	PAD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Unit	1	10.000.000	PAD
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>			%	<b>79</b>	<b>8.668.670.000</b>	
				<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri</b>		%			<b>90</b>			
				<b>Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat</b>		%			<b>85</b>			
				<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan</b>		%			<b>76,92</b>			
					<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Lap</b>	<b>462</b>	<b>8.212.770.000</b>	
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi	Lap	49	4.512.010.000	PAD
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi	Lap	192	1.568.190.000	PAD
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Provinsi	Lap	170	40.950.000	PAD

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Provinsi	Lap	8	209.700.000	PAD
					Pengawasan Umum dan Teknis kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Provinsi	Lap	9	800.000.000	PAD
					Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Provinsi	Lap	1	122.500.000	PAD
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi, Kabupaten /Kota	Lap	33	959.420.000	PAD
					<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Lap.</b>	<b>18</b>	<b>455.900.000</b>	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Provinsi	Lap.	8	90.000.000	PAD
					Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi	Lap.	10	365.900.000	PAD
					<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)</b>			<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>1.025.200.000</b>	
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>		<b>Lap.</b>	<b>1</b>	<b>6.500.000</b>	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Provinsi	Rekomen dasi	1	6.500.000	PAD
					<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Tersedianya Laporan Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Lap</b>	<b>66</b>	<b>1.018.700.000</b>	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi	PD	49	185.550.000	PAD
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi, Kab. Lannya	Kegia tan	11	743.150.000	
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi	PD	6	90.000.000	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dalam rangka mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di tahun 2024, serta sebagai sarana peningkatan kinerja dalam memberikan pertimbangan pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja dan tercapainya perencanaan pembangunan ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Palu, 26 Juli 2023

**Pih. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**SALIM, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP. 19721230 200012 1 004